



EVALUASI KEBIJAKAN PENANGKARAN BUAYA BINAAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH

EVALUATION OF THE CROCODILE BREEDING POLICY DURING THE CENTRAL SULAWESI NATURAL RESOURCES CONSERVATION CENTER

Vernanda Christin^{1*}, Intam Kurnia², Nasrullah³

Universitas Tadulako

***Email Correspondence:** vernan31@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Penangkaran Buaya Binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah bertujuan untuk menilai keberhasilan dan efektivitas kebijakan ini dalam mengelola penangkaran buaya, serta dampaknya terhadap kelestarian satwa dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, mitra penangkaran PT. Mas Indah Permai, dan masyarakat sekitar. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, dengan enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangkaran buaya ini belum sepenuhnya optimal. Indikator efektivitas menunjukkan bahwa meskipun program ini berjalan baik dalam membantu penanganan buaya, kendala seperti kekurangan infrastruktur dan pembiayaan masih menghambat pencapaian tujuan. Indikator efisiensi dan kecukupan juga menunjukkan ketidaksempurnaan, terutama dalam hal anggaran dan fasilitas yang diperlukan. Secara keseluruhan, program ini telah berkontribusi positif terhadap konservasi, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek regulasi dan dukungan keuangan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kebijakan, peraturan daerah, serta dukungan terhadap mitra penangkaran agar tujuan konservasi dapat tercapai secara lebih maksimal.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penangkaran Buaya, Konservasi Sumber Daya Alam.

ABSTRACT

Evaluation of the Crocodile Breeding Policy under the auspices of the Central Sulawesi Natural Resources Conservation Agency aims to assess the success and effectiveness of this policy in managing crocodile breeding, as well as its impact on wildlife conservation and community welfare. This study uses a qualitative descriptive method with primary and secondary data collected through interviews, observations, and documentation. Data were obtained from the Central Sulawesi Natural Resources Conservation Agency, breeding partners PT. Mas Indah Permai, and the surrounding community. The analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation theory, with six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study indicate that this crocodile breeding policy is not yet fully optimal. The effectiveness indicator shows that although this program is running well in helping to handle crocodiles, obstacles such as lack of infrastructure and financing still hinder the achievement of objectives. The efficiency and adequacy indicators also show imperfections, especially in terms of the budget and facilities needed. Overall, this program has made a positive contribution to conservation, but still requires improvements in the aspects of regulation and financial support. This study suggests the need to improve policies, regional regulations, and support for breeding partners so that conservation objectives can be achieved more optimally.

Keywords: Policy Evaluation, Crocodile Breeding, Natural Resource Conservation.

PENDAHULUAN

Keberagaman hayati Indonesia menjadi salah satu kekayaan alam yang tak ternilai, yang memerlukan perlindungan dan

pengelolaan yang bijaksana. Sebagai negara dengan ekosistem yang sangat kaya, Indonesia memiliki banyak spesies yang terancam punah dan membutuhkan upaya



konservasi untuk mempertahankan kelestariannya. Salah satu spesies yang menjadi fokus perhatian adalah buaya muara (*Crocodylus porosus*), yang populasi di alam liar semakin menurun akibat perburuan ilegal, perusakan habitat, dan konflik dengan manusia. Untuk itu, kebijakan penangkaran buaya di Sulawesi Tengah menjadi salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk melestarikan spesies ini dan mengurangi konflik antara manusia dan buaya.

Penangkaran buaya sebagai bagian dari upaya konservasi satwa liar di Indonesia menjadi topik yang sangat relevan mengingat tingginya kasus konflik antara buaya dengan masyarakat di beberapa wilayah, termasuk di Sulawesi Tengah. Konflik ini sering kali terjadi karena buaya memasuki pemukiman atau perairan yang digunakan oleh manusia, menyebabkan ancaman terhadap keselamatan manusia dan kehidupan buaya itu sendiri. Sebagai upaya mitigasi, penangkaran buaya telah dijalankan di beberapa tempat, termasuk oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan mitra binaannya, PT. Mas Indah Permai, yang memiliki fasilitas penangkaran buaya di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

Meskipun program penangkaran buaya ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pengurangan konflik antara manusia dan buaya serta melestarikan spesies ini, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, baik dari segi infrastruktur, regulasi, maupun dukungan finansial dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan penangkaran buaya ini sangat penting dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Evaluasi kebijakan ini akan melihat dari berbagai indikator, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa depan agar program penangkaran buaya di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan penangkaran buaya binaan BKSDA Sulawesi Tengah dan memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya konservasi satwa liar ini.

Penelitian ini penting untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam rangka pelestarian satwa liar buaya, serta untuk mendukung peraturan daerah yang lebih komprehensif terkait dengan perlindungan dan konservasi satwa liar di Sulawesi Tengah. Dengan mengetahui sejauh mana kebijakan ini berjalan dengan baik, diharapkan ke depan dapat diperoleh kebijakan yang lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan dan perlindungan satwa liar, termasuk dalam hal penangkaran buaya.

Adapun penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konservasi sumber daya alam, khususnya dalam evaluasi kebijakan publik yang berfokus pada pelestarian satwa liar di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan para pembuat kebijakan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif mengenai efektivitas kebijakan penangkaran buaya, yang pada gilirannya dapat



memperbaiki implementasi kebijakan konservasi satwa liar di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi Publik

Administrasi publik adalah disiplin yang mempelajari kegiatan organisasi pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Herbert A. Simon (1999) dalam bukunya menyatakan bahwa administrasi publik melibatkan kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks negara dan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat menjalankan kebijakan dengan efisiensi dan efektivitas, mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal, serta memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Dalam konteks kebijakan penangkaran buaya, administrasi publik berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan kebijakan konservasi satwa liar, yang mencakup hubungan antara pemerintah, mitra penangkaran, dan masyarakat.

Teori administrasi publik juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan dapat mencapai tujuannya. Evaluasi kebijakan yang baik dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kelemahan dalam implementasi kebijakan serta memperbaiki proses dan strategi yang digunakan agar tujuan konservasi dapat tercapai dengan lebih optimal.

Kebijakan Publik dan Penangkaran Satwa Liar

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik dapat

berupa tindakan, peraturan, atau program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Menurut Thomas R. Dye (1992), kebijakan publik adalah segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, kebijakan penangkaran buaya adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melestarikan satwa liar yang terancam punah dan mengurangi dampak negatif dari konflik antara manusia dan buaya.

Penangkaran buaya merupakan salah satu bentuk kebijakan konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi buaya yang terancam punah melalui pembiakan di lingkungan yang terkontrol. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005, penangkaran satwa liar bertujuan untuk mendapatkan spesimen yang memiliki kualitas dan keragaman genetik yang terjamin, untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam liar. Penangkaran juga memiliki tujuan ekonomi yang dapat memberikan manfaat finansial bagi masyarakat melalui pemanfaatan satwa liar yang terjaga kelestariannya.

Namun, kebijakan penangkaran buaya tidak lepas dari tantangan, baik dalam hal pembiayaan, peraturan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini yang menjadi alasan mengapa evaluasi kebijakan penangkaran buaya sangat penting untuk dilakukan, agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan konservasi yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai



tujuannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. William N. Dunn (1995) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan dengan menggunakan serangkaian indikator yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap indikator ini menggambarkan aspek penting dari pelaksanaan kebijakan yang perlu dievaluasi secara mendalam.

Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Dalam konteks kebijakan penangkaran buaya, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan program ini dalam mengurangi konflik antara manusia dan buaya serta melestarikan populasi buaya. Efisiensi mengukur apakah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan telah menghasilkan hasil yang maksimal. Evaluasi efisiensi akan melihat bagaimana penggunaan anggaran dan fasilitas penangkaran dilakukan untuk mencapai tujuan konservasi. Kecukupan menilai apakah kebijakan telah memenuhi kebutuhan yang ada, seperti dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan program penangkaran buaya.

Pemerataan terkait dengan sejauh mana manfaat kebijakan didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemerataan berkaitan dengan bagaimana kebijakan penangkaran buaya memberikan manfaat yang setara antara pemerintah, mitra penangkaran, dan masyarakat. Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan dan keluhan dari masyarakat. Evaluasi responsivitas akan menilai sejauh mana pemerintah dan BKSDA telah mendengarkan dan menanggapi masukan dari masyarakat

terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Ketepatan menilai apakah kebijakan ini dijalankan dengan tepat sasaran, yaitu dengan memberikan manfaat yang diinginkan bagi populasi buaya dan masyarakat setempat.

Evaluasi kebijakan, menurut Dunn, tidak hanya sekedar memberikan angka atau penilaian, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor yang terlibat. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan penangkaran buaya di Sulawesi Tengah dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal.

Studi Terkait tentang Kebijakan Penangkaran Buaya

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan penangkaran satwa liar di Indonesia, termasuk buaya. Penelitian oleh Prasetyo (2019) mengenai kebijakan penangkaran satwa liar di Jawa Timur menunjukkan bahwa penangkaran satwa liar seperti buaya dapat membantu mengurangi konflik dengan manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya masalah dalam hal pengawasan, pengelolaan dana, dan regulasi yang tidak memadai.

Selain itu, penelitian oleh Widyastuti (2021) tentang kebijakan konservasi buaya di Kalimantan mengungkapkan bahwa kebijakan penangkaran buaya menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, terutama dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah, mitra penangkaran, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pengelolaan dan pengawasan penangkaran



satwa liar yang dapat menghambat keberhasilan kebijakan.

Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan penangkaran buaya di Sulawesi Tengah, dengan menilai apakah kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam hal pemberdayaan ekonomi, serta sejauh mana kebijakan ini dapat mengurangi konflik antara manusia dan buaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan penangkaran buaya yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data yang lebih mendalam mengenai kondisi yang ada di lapangan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, termasuk staf BKSDA Sulawesi Tengah, pemilik PT. Mas Indah Permai, dan masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait kebijakan penangkaran buaya. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan data statistik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai

pelaksanaan kebijakan penangkaran buaya, sedangkan observasi lapangan digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Analisis ini bertujuan untuk menilai keberhasilan kebijakan penangkaran buaya berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di lapangan. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penangkaran buaya di Sulawesi Tengah, yang dianalisis berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan penangkaran buaya ini.

Efektivitas

Indikator efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, tujuan dari kebijakan penangkaran buaya adalah untuk mengurangi konflik antara manusia dan buaya, serta untuk melestarikan spesies buaya muara yang terancam punah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA Sulawesi Tengah, Bambang Widiatmoko,



S.Hut., M.Sc, program penangkaran buaya di Sulawesi Tengah telah menunjukkan kemajuan dalam mengurangi konflik antara manusia dan buaya. Program ini membantu mengurangi jumlah buaya yang dibunuh oleh masyarakat karena terpaksa berinteraksi dengan pemukiman manusia. Namun, meskipun program ini cukup efektif dalam menanggulangi konflik, BKSDA Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk penangkaran buaya.

Pemilik PT. Mas Indah, Sugeng, menyatakan bahwa meskipun mereka telah menerima pembinaan dari BKSDA, perusahaan mereka masih menghadapi masalah terkait dengan penyediaan fasilitas yang memadai untuk penangkaran buaya. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial dan infrastruktur menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas program ini. Oleh karena itu, meskipun kebijakan penangkaran buaya dapat dianggap cukup efektif dalam mengurangi konflik, kurangnya dukungan infrastruktur dan pembiayaan menghalangi pencapaian tujuan secara optimal.

Efektivitas kebijakan penangkaran buaya ini belum sepenuhnya optimal. Infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya bantuan finansial dari pemerintah menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk mencapai efektivitas penuh, perbaikan dalam aspek pendanaan dan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan.

Efisiensi

Efisiensi mengukur apakah kebijakan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, efisiensi program penangkaran

buaya dilihat dari segi penggunaan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang terlibat.

Menurut Bambang Widiatmoko, BKSDA Sulawesi Tengah telah melaksanakan program penangkaran buaya dengan baik meskipun tantangan dalam hal anggaran tetap ada. Program ini telah berjalan dengan lancar berkat kerjasama antara BKSDA dan PT. Mas Indah, yang meskipun tanpa dukungan dana langsung dari pemerintah daerah, tetap berusaha maksimal menjalankan program ini. Selain itu, informasi mengenai buaya juga telah disebarluaskan melalui berbagai media sosial BKSDA untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai keberadaan dan pentingnya konservasi buaya.

Namun, pemilik PT. Mas Indah mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah menginvestasikan dana pribadi untuk pembangunan fasilitas penangkaran buaya, mereka belum mendapatkan dukungan modal dari pemerintah daerah atau BKSDA. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada usaha maksimal dari pihak swasta, ketergantungan pada modal pribadi mengurangi efisiensi pelaksanaan program.

Program ini telah dijalankan dengan upaya maksimal dari pihak swasta (PT. Mas Indah), namun kurangnya dukungan finansial dari pemerintah daerah mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Dengan adanya pendanaan yang lebih baik, efisiensi program ini bisa ditingkatkan.

Kecukupan

Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana program dan masyarakat. Dalam hal ini, kecukupan dapat diukur dengan melihat apakah fasilitas, pelatihan, dan dukungan



finansial yang diberikan kepada mitra penangkaran buaya telah memadai.

Bambang Widiatmoko mengungkapkan bahwa pihak BKSDA telah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan terkait penangkaran buaya kepada PT. Mas Indah. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh mitra penangkaran adalah kurangnya bantuan finansial dan infrastruktur yang memadai. Meskipun ada pembinaan teknis, pemilik PT. Mas Indah, Sugeng, merasa bahwa fasilitas yang ada masih terbatas dan tidak mencukupi untuk memperbesar penangkaran buaya. Oleh karena itu, meskipun ada upaya pembinaan, kecukupan fasilitas dan dukungan finansial menjadi masalah besar yang harus diatasi.

Program penangkaran buaya tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan baik dari sisi fasilitas maupun dukungan keuangan. Tanpa adanya dukungan yang lebih baik dari pemerintah daerah, program ini akan kesulitan untuk berkembang dan mencapai tujuan konservasi secara maksimal.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik berarti apakah manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, mitra penangkaran, maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Aprilino, salah satu warga desa Beka, mereka menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program penangkaran buaya ini. Pembinaan yang dilakukan oleh BKSDA mengenai satwa liar buaya dan kesadaran tentang pelestarian tumbuhan dan satwa liar juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Namun, masyarakat mengharapkan lebih

banyak dukungan dalam bentuk penyuluhan dan bantuan langsung terkait pelestarian satwa liar.

Meskipun demikian, pemilik PT. Mas Indah merasa bahwa mereka kurang mendapatkan dukungan yang setimpal, mengingat mereka telah berinvestasi besar dalam pembangunan fasilitas penangkaran. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa manfaat bagi masyarakat setempat, pemerataan manfaat bagi mitra penangkaran dan pemerintah daerah masih perlu diperbaiki.

Meskipun masyarakat setempat merasakan manfaat dari kebijakan ini, pemerataan manfaat belum berjalan secara optimal, terutama bagi mitra penangkaran yang merasa kurang mendapatkan dukungan yang setimpal. Program ini masih membutuhkan distribusi yang lebih adil terhadap semua pihak terkait.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pihak terkait lainnya. Masyarakat setempat memberikan tanggapan positif terhadap program ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Lukman Bualo, staf Wildlife Rescue Unit (WRU) BKSDA Sulawesi Tengah. Mereka mengakui bahwa kerjasama antara BKSDA, PT. Mas Indah, dan masyarakat setempat telah berjalan dengan baik, dengan adanya sosialisasi yang meningkatkan pemahaman tentang pelestarian satwa liar buaya.

Namun, beberapa pihak berharap agar responsivitas program ini lebih ditingkatkan, terutama dalam memberikan dukungan lebih lanjut terkait fasilitas dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka lebih terlibat dalam program ini.



Program ini menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik, terutama dalam hal sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat. Namun, ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemberian fasilitas tambahan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi buaya.

Ketepatan

Ketepatan mengukur sejauh mana kebijakan dan program ini tepat sasaran. Program penangkaran buaya ini telah berhasil melibatkan pihak yang tepat dalam konservasi satwa liar, yaitu mitra penangkaran yang berkomitmen untuk melestarikan buaya muara dan pemerintah yang menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

Meskipun demikian, pemilik PT. Mas Indah menyatakan bahwa meskipun mereka telah mengikuti pembinaan yang diberikan oleh BKSDA, mereka mengharapkan adanya dukungan lebih lanjut dalam hal pendanaan dan fasilitas untuk memperbesar kapasitas penangkaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini tepat sasaran, ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya tepat dalam pelaksanaannya.

Program penangkaran buaya ini dapat dikatakan tepat sasaran, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan penyediaan fasilitas dan dukungan finansial untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penangkaran buaya binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam upaya konservasi buaya muara (*Crocodylus porosus*) dan pengurangan

konflik antara manusia dan satwa liar, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa meskipun program ini telah memberikan beberapa hasil positif, ada sejumlah kendala yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberhasilannya.

Efektivitas program penangkaran buaya sudah cukup baik dalam mengurangi konflik antara manusia dan buaya, namun masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur yang memadai dan dukungan finansial dari pemerintah daerah. Pemilik PT. Mas Indah, selaku mitra penangkaran, mengungkapkan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan yang cukup dalam hal fasilitas, meskipun program ini berkontribusi positif terhadap konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berjalan dengan tujuan yang jelas, dukungan fisik dan finansial yang belum maksimal menghambat efektivitasnya.

Dari sisi efisiensi, meskipun pihak BKSDA dan PT. Mas Indah bekerja sama dalam pengelolaan penangkaran buaya, ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dana dan fasilitas yang memadai mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya. Kecukupan program penangkaran buaya juga menunjukkan bahwa meskipun ada pembinaan dan pelatihan, fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada mitra penangkaran masih terbatas. Pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung program ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyediaan sumber daya.

Dalam hal pemerataan, manfaat kebijakan ini belum dirasakan secara merata, terutama bagi mitra penangkaran. Walaupun



masyarakat setempat mendapatkan manfaat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi mengenai pelestarian satwa liar, mitra penangkaran merasa bahwa mereka kurang mendapatkan dukungan yang sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Responsivitas kebijakan ini sudah cukup baik, dengan adanya kerjasama antara BKSDA, PT. Mas Indah, dan masyarakat setempat, namun masih ada kebutuhan untuk peningkatan fasilitas dan dukungan lebih lanjut.

Terkait dengan ketepatan, program ini sudah tepat sasaran dalam hal tujuan konservasi buaya, tetapi dalam implementasinya masih terdapat masalah terkait pendanaan dan fasilitas, yang menghambat pencapaian tujuan secara maksimal.

Secara keseluruhan, kebijakan penangkaran buaya di Sulawesi Tengah perlu mendapatkan perbaikan, terutama dalam hal dukungan finansial dan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan regulasi daerah yang mendukung kebijakan ini serta memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal pendanaan dan fasilitas untuk mitra penangkaran. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, program penangkaran buaya ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelestarian satwa liar dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rekomendasi dari penelitian ini antara lain adalah agar pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah yang mengatur penangkaran satwa liar, termasuk buaya, serta menyediakan dukungan anggaran yang lebih baik untuk mitra penangkaran. Selain itu, BKSDA juga perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap mitra penangkaran untuk memastikan keberlanjutan

dan keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimock, M., & Dimock, H. (1992). *Public Administration: An Introduction to the Theory and Practice of Public Administration*. New York: McGraw-Hill.
- Dunn, W. (1995). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy (7th Ed.)*. New York: Prentice Hall.
- Dye, Thomas R. (2007). *Understanding Public Policy (10th Ed.)*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Green, J., & Jenkins, M. (2015). *Conservation Strategies: Global Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Herbert A. Simon. (1999). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*. 4th ed. New York: Free Press.
- Leonard D. White. (1999). *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan.
- Neumann, R. (2014). *Conservation and Development: Global Experiences*. London: Routledge.
- Prasetyo, A. (2019). Kebijakan Penangkaran Satwa Liar di Jawa Timur: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan. *Jurnal Konservasi Alam*, 12(2), 34-45.
- Rahayu, S. (2017). Peran Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 11(2), 101-112.



- Rifai, M. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Indonesia: Konsep dan Praktik*. Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Siahaan, P. (2018). *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. (1993). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: BPF.
- Winarno, Budi. (2014). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pessindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Waldo, D. (1971). *The Administrative State: A Study of Political Theory*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Widyastuti, N. (2021). Analisis Kebijakan Konservasi Buaya di Kalimantan: Studi Kasus di Penangkaran Satwa Liar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 78-90.
- Williams, A., & Smith, D. (2017). *Public Policy and Conservation Strategies*. Oxford: Oxford University Press.